



LAPORAN TAHUNAN 2023

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Sukonandi No.8, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Telp : (0274) – 513492

Website : <https://diy2023.kemenag.go.id>

Twitter & instagram: @kemenag_diy



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama tahun 2023. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja Pada Kementerian Agama, maka penyusunan laporan kinerja merupakan wujud pelaksanaan *good governance* serta sekaligus pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

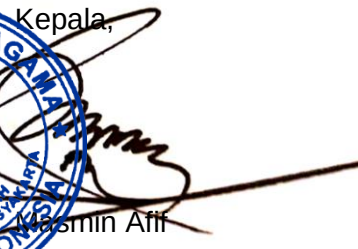
Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023. Laporan Kinerja tahun 2023 ini menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sampai berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil



kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Kepala,

Masmin Afri





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sistematika Penyajian	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
C. Rencana Strategis	15
D. Sasaran Kegiatan	17
E. Perjanjian Kinerja	40
BAB III. CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	58
B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	83
C. Analisis Capaian Kinerja	84
D. Realisasi Anggaran	142
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	
A. PERJANJIAN KINERJA	
B. SK PENYUSUN LAPORAN KINERJA	



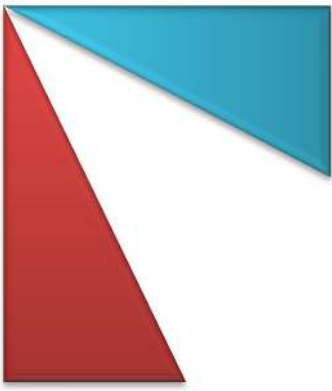
IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja Pada Kementerian Agama.

Pada Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa indikator kinerja satuan kegiatan (IKSK) yang dapat tercapai 100%, akan tetapi di satu sisi ada beberapa indikator kinerja satuan kegiatan (IKSK) yang belum tercapai sesuai target. Dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan.

Dari sisi anggaran, pada Tahun 2023 dari total anggaran Rp 116.161.960.289 terealisasi untuk belanja pegawai sejumlah Rp 66.504.027.139, untuk belanja barang Rp 23.802.397.525, belanja modal Rp 24.079.409.671 dan belanja bantuan social Rp 0 .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian RI dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kebijakan Menteri Agama RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 71 Madrasah dan 78 KUA yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menganut asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-



baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan laporan kinerja yang menentukan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama

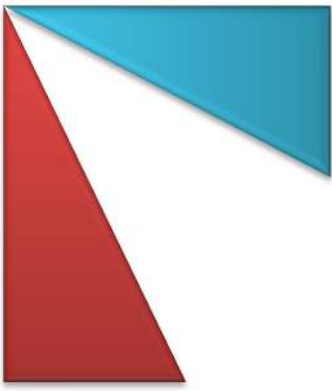
b. Tugas Pokok

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

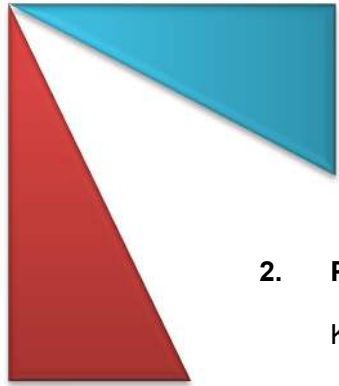
c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- i. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;



- ii. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- iii. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- iv. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- v. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- vi. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- vii. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.



2. Profil SDM Kanwil Kementerian Agama DIY

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY didukung oleh 4.371 pegawai dengan berbagai latar belakang baik jenis kelamin, agama, pendidikan dan lain-lain. Berikut sajian data pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

1) Berdasarkan Agama

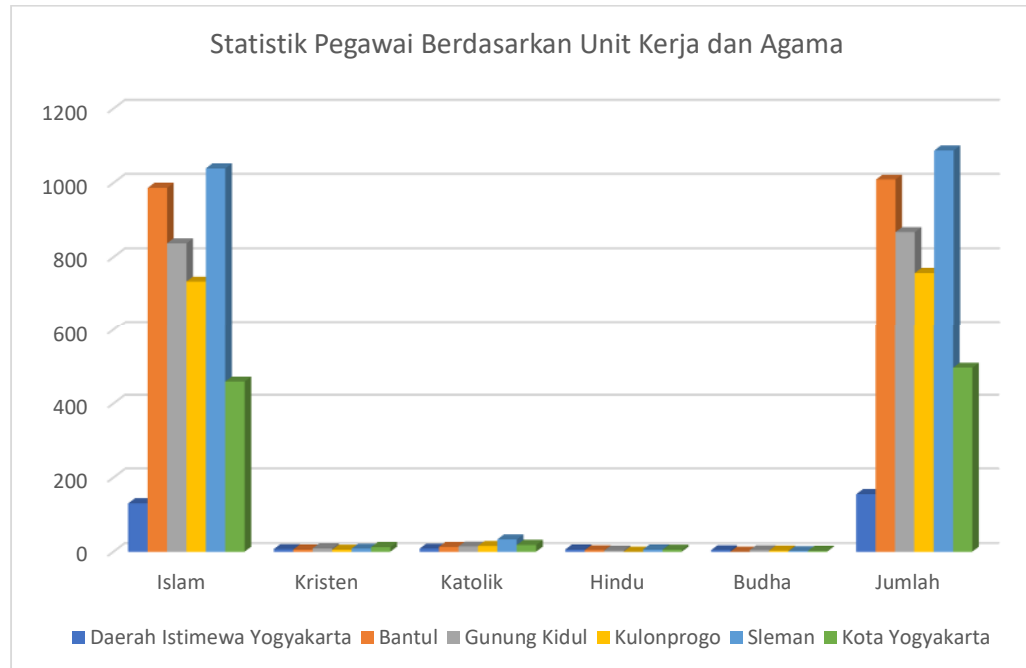
KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNIT KERJA DAN AGAMA

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Agama					Ket.
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	155	130	7	8	6	4	
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1,009	986	6	13	4	0	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	867	837	9	14	3	4	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	757	734	5	15	0	3	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,087	1,039	8	33	6	1	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	496	459	12	18	5	2	
Jumlah		4,371	4,185	47	101	24	14	

simpeg kemenag / 06/02/2024 08:09





2) Berdasarkan Golongan

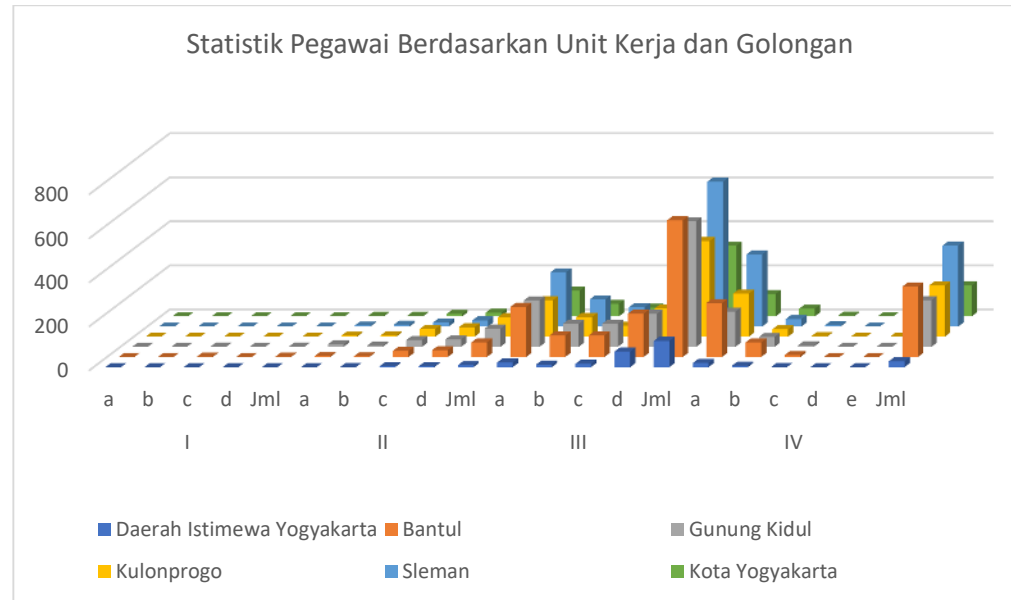
KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN GOLONGAN

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan/Ruang																					Ket.	
			I					II					III					IV							
			a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	e	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	155	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	21	12	15	71	119	19	7	1	0	0	27	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1.009	0	0	2	0	2	4	3	28	31	66	228	98	98	197	621	245	66	9	0	0	320	0	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	887	0	0	1	0	1	12	6	31	34	83	211	105	105	150	571	180	45	7	0	0	212	0	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	757	0	0	0	0	0	5	6	35	43	89	166	90	50	129	435	196	34	3	0	0	233	0	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1.087	0	0	0	0	0	5	9	19	28	61	247	124	88	199	658	328	34	6	0	0	368	0	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	496	0	0	0	0	0	3	3	11	17	34	117	57	40	107	321	102	35	4	0	0	141	0	
Jumlah		4.371	0	0	3	0	3	29	28	128	157	342	990	488	396	853	2.725	1.060	221	30	0	0	1.301	0	

simpeg kemenag / 05/02/2024 05:13





3) Berdasarkan Jenis Kelamin

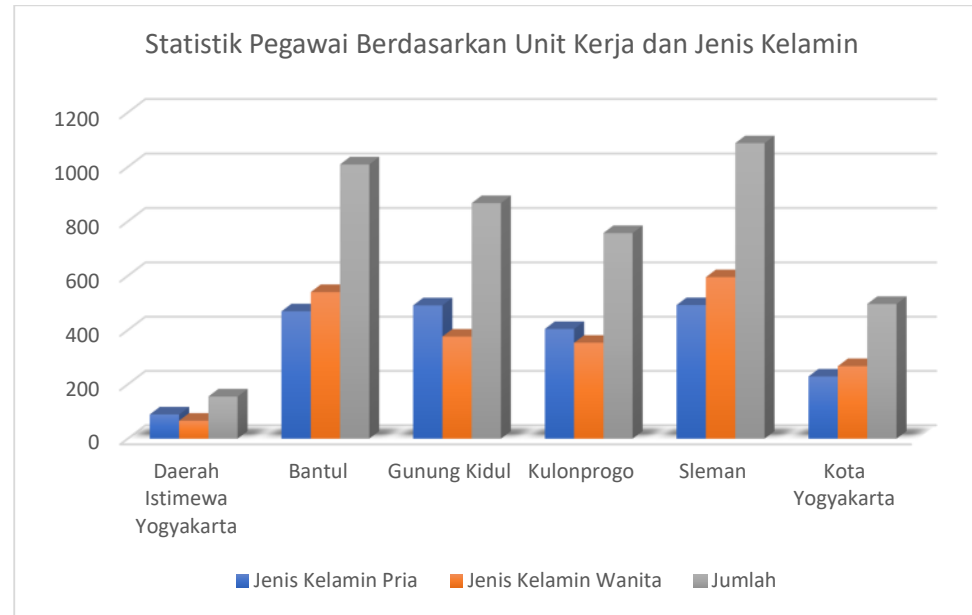
KEMENTERIAN AGAMA

**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JENIS KELAMIN**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin		Ket.
			Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	155	89	66	
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1,009	469	540	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	867	491	376	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	757	404	353	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,087	492	595	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	496	229	267	
Jumlah		4,371	2,174	2,197	

simpeg kemenag / 06/02/2024 08:11





4) Berdasarkan Pendidikan

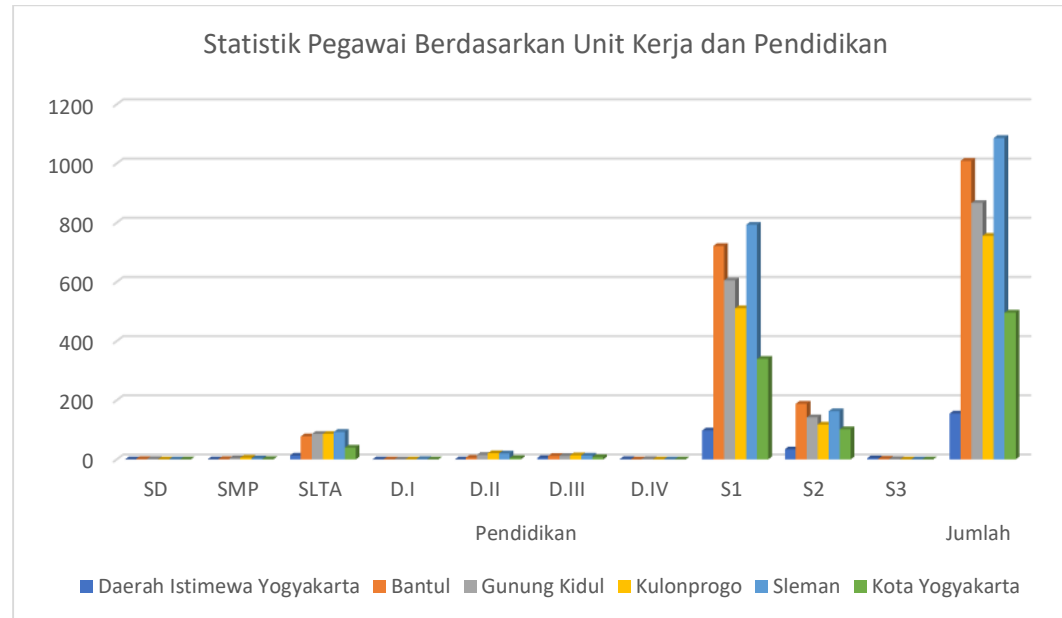
KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan										Ket.
			SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	155	0	0	13	0	0	5	1	98	34	4	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1,009	1	1	78	0	6	12	0	721	188	2	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	867	1	4	86	0	15	12	1	605	142	1	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	757	0	6	86	0	21	14	0	511	118	0	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,087	0	3	93	1	20	13	0	793	163	0	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	496	0	1	40	0	5	8	0	340	102	0	0
Jumlah		4,371	2	15	396	1	67	64	2	3,068	747	7	0

simpeg kemenag / 06/02/2024 08:12





5) Berdasarkan Usia

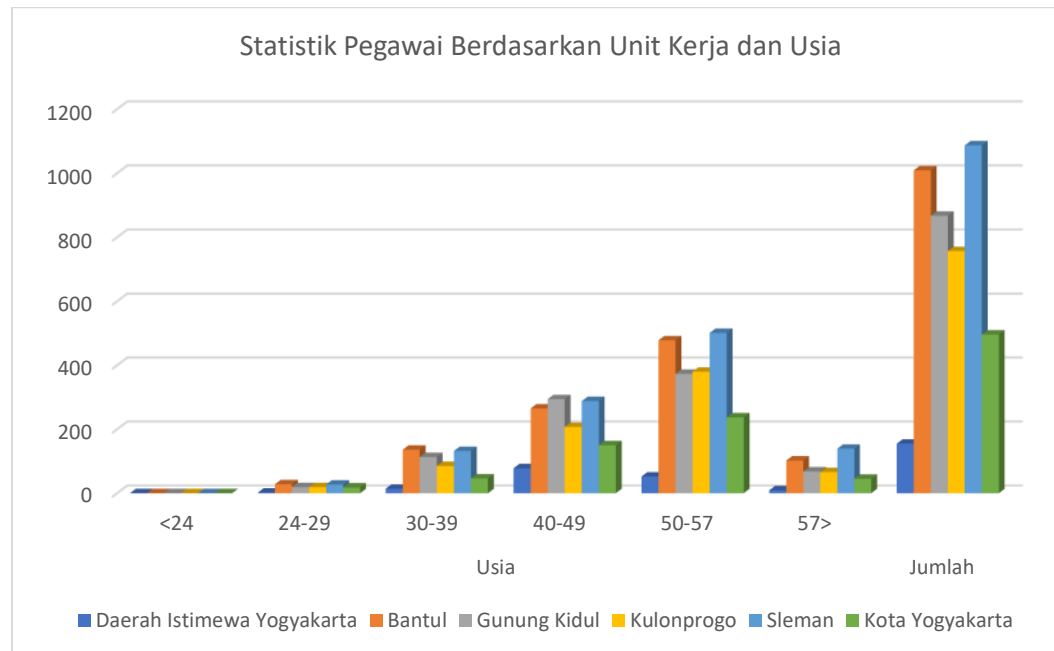
KEMENTERIAN AGAMA

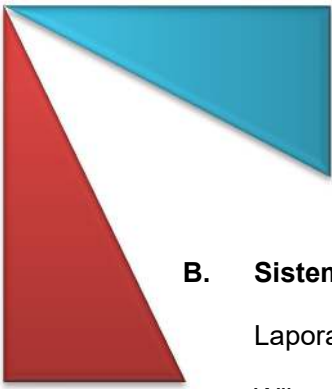
STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN USIA

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Usia						Ket.
			<24	24-29	30-39	40-49	50-57	57>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	155	0	2	14	78	52	9	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1,009	0	28	136	265	478	102	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	867	0	19	113	294	373	68	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	757	0	19	85	207	380	66	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,087	0	27	132	288	501	139	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	496	0	18	46	150	237	45	0
Jumlah		4,371	0	113	526	1,282	2,021	429	0

simpeg kemenag / 06/02/2024 08:12





B. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Tahun 2023, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang penyusunan LKj
2. Bab II – Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja Tahun 2023.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2023.
4. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2023.
5. Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2022 – 2024 adalah ***“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”***.

Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, maka guna mendukung pembangunan pembangunan bidang agama serta pencapaian visi dan misi, disusun tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;



4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.



B. Sasaran Kegiatan

Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I Yogyakarta mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta menetapkan 53 Sasaran Kegiatan pada tahun 2022 yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi D. I Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:



a. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Nilai kinerja penyuluh agama;
- 2) Persentase penyuluh agama yang dibina;
- 3) Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
- 4) Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2. Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - 2) Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - 3) Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
- b. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - 2) Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
- c. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
- d. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



- 1) Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - 2) Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
- e. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
- f. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - 2) Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - 3) Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - 4) Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
- g. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitujumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
- h. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



- 1) Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
- 2) Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
- 3) Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
- 4) Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
- 5) Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
- 6) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
- 7) Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
- 8) Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
- 9) Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
- 10) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
- 11) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.



i. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- 1) Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
- 2) Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

3. Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Peningkatan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
- b. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap



kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);

- c. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
- d. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1) Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - 2) Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

4. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - 2) Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - 3) Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - 4) Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - 5) Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - 6) Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - 7) Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - 2) Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - 3) Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - 4) Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - 5) Jumlah penghulu yang dibina.



- c. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
- d. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - 2) Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - 2) Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- g. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.



- h. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

5. Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Peningkatan pemanfaatn ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Persentase amil yang dibina ;
 - 2) Persentase lembaga zakat yang dibina.
- b. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - 2) Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - 3) Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.



6. Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - 3) Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - 4) Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.



- b. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - 2) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - 3) Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - 4) Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - 5) Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - 6) Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
 - 7) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
- c. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - 3) Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-



pembelajaran;

- 4) Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

7. Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I. Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - 2) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - 3) Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - 4) Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;



- 5) Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - 6) Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - 7) Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
- b. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - 2) Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 - 3) Persentase siswa madrasah penerima PIP
 - 4) Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
 - 5) Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
- c. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - 2) Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
- d. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan,yaitu : jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP.



8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 - 2) Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - 3) Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - 4) Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang



mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;

- b. Terpenuhiya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - 2) Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - 3) Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - 4) Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- c. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 - 2) Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 - 3) Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1;
 - 4) Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2.
- d. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan



- 1) Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
- 2) Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

9. Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu:

- a. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatanyaitu:
 - 1) Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;
 - 2) Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
- b. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1) Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;
 - 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;



- 3) Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;
- 4) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;

10. Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - 2) Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - 3) Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;



- 4) Persentase madrasah yang ramah anak.
- 5) Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.

b. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- 2) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- 3) Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina;
- 4) Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina;

11. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor



Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1) Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - 2) Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - 3) Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing.
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - 1) Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - 2) Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - 3) Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan;
 - 4) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - 5) Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - 6) Persentase data ASN yang diupdate.
- d. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan



sebagai berikut :

- 1) Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - 2) Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 3) Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - 4) Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
- e. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - 2) Persentase tanah yang bersertifikat;
 - 3) Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
- f. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - 2) Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - 3) Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
- g. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



- 1) Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - 2) Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - 3) Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
- h. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - 2) Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - 3) Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
- i. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - 2) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
- j. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
- k. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



- 1) Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - 2) Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - 3) Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - 4) Persentase menurunnya lelang gagal;
 - 5) Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
- l. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
- m. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - 2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
- n. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - 2) Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
- o. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional



C. Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	85	Nilai
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	100	%
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	468	Orang
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1.850	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	95	%
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	290	Orang
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	4	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6.800	Lembaga/ Orang
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	46	Kegiatan



4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	65 62	% Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	65 70 485 6	% % Orang Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	152	Konten/ Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100 100	% %



		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	%
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	%
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	12	Kegiatan



		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama 11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	95 5	% %
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	12	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	61	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	11	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	5 18	KUA Pengelola



		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat 6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina 7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	50 480 60 58 200 20 1	Paket Buah % Layanan Lokasi Orang Lokasi
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina	3 5 9.350 3.860 47	KUA KUA Orang Anak Orang



17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hittasukhaya	555	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	100 0,06	% %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	2. Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	95,10	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	87,62 74,04	% %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	100 94,09 91,33	% % %



		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	83 100 2 16	% % Madrasah Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	48 10 58 17	% % % Penghargaan



		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	369	Kegiatan
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	55	%



		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	87	%
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	88	%
		4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	66	%
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	100	%
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	100	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagianak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	27.150	Siswa
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah	2.800	Siswa
		3. Persentase siswa madrasah penerima PIP	19	%
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	40	%
		5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	19	%



30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	54 30	% %
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	11.250	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi 2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	51 75 75 62	% % % %
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi	89	%



	minimal	kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90 90 88	% % %
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; 3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	51 58 95 1	% % % Orang
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. 2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam	43 50	Madrasah Sekolah



		meningkatkan status akreditasi.		
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	77 57 5 9	% % % %
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; 4. Persentase madrasah yang ramah anak.	100 100 14 34	% % % %
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina	15	Madrasah



	kepramukaan	kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina 4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	1 32 3	Sekolah Gugus Gugus
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	95 96 2	% % Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	86	%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil	88 83 65	% % %



		assesmen kompetensi dengan jabatan	55	%
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	66	%
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	81	%
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		
		7. Persentase data ASN yang diupdate	92	%
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	77	%
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	94	Laporan
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	93	%
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	98	%
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	97	%
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang	86	%



		ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat 90 % 3. Persentase nilai <i>Opname Phisic</i> (OP) BMN 90 %		
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 72 % 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 79 % 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 76 %		
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 88 % 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 32 Satker 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja 31 Orang		



46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	92 76 73	% % %
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	88 82	% %
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	88	%
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	96 92 93	% % %
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	93	%
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan	94	Konten



		pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	94	%
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	91	%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	4.307	Orang

Nilai Kinerja Anggaran : 95

Kode	Nama Program / Kegiatan	Anggaran
DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	12.866.806.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	4.282.530.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1.110.000.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.486.105.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1.028.000.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	93.112.000
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	34.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	858.000.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.210.700.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.186.460.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	557.000.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	268.000.000
2148	Pembinaan Haji	210.539.000
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	-
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	542.360.000
DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	24.005.299.000
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	1.465.000.000
2129	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	21.914.799.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	33.500.000
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	-
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	480.000.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	112.000.000
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	43.938.014.000
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	9.442.500.000
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	31.540.694.000



4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	534.620.000
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	724.500.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	721.000.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	350.700.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	411.000.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	213.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	35.507.484.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	40.000.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	434.516.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	15.771.017.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	150.000.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	250.000.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	3.837.951.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	70.000.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	8.796.664.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	980.695.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	2.363.631.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	114.000.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	187.569.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	269.400.000
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	85.000.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.549.932.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	195.000.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	146.109.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	66.000.000
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	200.000.000
TOTAL		116.317.603.000



BAB III.

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada masing- masing sasaran kegiatan.



ROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
		2023		
SK.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama			
IKSK.1	Nilai kinerja penyuluh agama	85	85	100%
IKSK.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	100	100	100%
IKSK.3	Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi	468	414	88.46%
IKSK.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1.850	2.925	120%
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama			
IKSK.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	90	90	100%
IKSK.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	290	436	120%
IKSK.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	4	1	25%



SK.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa			
IKSK.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6.800	3.475	51.1%
IKSK.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	46	53	115%
SK.4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)			
IKSK.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	100%
SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama			
IKSK.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	65	65	100%



IKSK.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	54	65	120%
SK.6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama			
IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	100%
SK.7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yangtoleran			
IKSK.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	60	92	120%
IKSK.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	70	95	120%
IKSK.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485	60	12.37%
KSK.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	6	5	83.3%
SK.8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik			
IKSK.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di	152	155	102%



	media massa dan ruang publik			
SK.9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama			
IKSK.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.2	Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam	100	100	100%



	moderasi beragama			
IKSK.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	100%
IKSK.10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	12	12	100%
IKSK.11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	1	100%
SK.10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam			
IKSK.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	95	95	100%
IKSK.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah	5	5	100%



	takmilyah dan pendidikan AlQur'an			
SK.11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya			
IKSK.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	12	7	58.3%
SK.12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat			
IKSK.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	61	61	100%
SK.13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama			
IKSK.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	11	11	100%



SK.14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama			
IKSK.1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	5	25	120%
IKSK.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	18	45	120%
SK.15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan			
IKSK.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	50	50	100%
IKSK.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	480	820	120%
IKSK.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	60	60	100%
IKSK.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	58	58	100%
IKSK.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	200	200	100%
IKSK.6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20	2	10%



IKSK.7	Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1	1	100%
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)			
IKSK.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	3	13	120%
IKSK.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	5	78	120%
IKSK.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	9.350	40.500	120%
IKSK.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	3.860	6.500	120%
IKSK.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	47	47	100%
SK.17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga			
IKSK.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusakasakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	555	1.862	120%
SK.18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadahumrah dan penyelenggara ibadah haji khusus			



IKSK.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	100	100%
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji			
IKSK.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100	100	100%
IKSK.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0.06	0.06	100%
SK.20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji			
IKSK.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	100%
SK.21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji			
IKSK.1	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji (3131)	95.10	95.10	100%
SK.22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi			



	haji terpadu			
IKSK.1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	100	100	100%
SK.23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat			
IKSK.1	Persentase amil yang dibina	87.62	106	120%
IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang dibina	73.04	90	120%
SK.24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf			
IKSK.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	100	120	120%
IKSK.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	94.09	94.09	100%
IKSK.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	91.33	91.33	100%
SK.25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif			
IKSK.1	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	83	83	100%



IKSK.2	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	100	105	105%
IKSK.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	2	4	120%
IKSK.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	16	16	100%
SK.26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan			
IKSK.1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	48	48	100%
IKSK.2	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	58	58	100%
IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	58	58	100%
IKSK.4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	17	17	100%



IKSK.5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolahkeagamaan	369	369	100%
IKSK.6	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	100	100	100%
IKSK.7	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	100	100	100%
SK.27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	100	100%
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	100	100%
IKSK.3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	100	100%



IKSK.4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahanbelajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	100	100%
SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan			
IKSK.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekhayang memenuhi SPM sarana prasarana	55	57.36	104.3%
IKSK.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM saranaprasarana	87	100	114.9%
IKSK.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPMsarana prasarana	66	66	100%
IKSK.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPMsarana prasarana	100	100	100%
IKSK.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhiSPM sarana dan prasarana	100	100	100%



IKSK.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	100	100	100%
SK.29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat			
IKSK.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	27.150	27.532	101.41%
IKSK.2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah	2.800	1.973	70.46%
IKSK.3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	19	61.57	120%
IKSK.4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	40	40	100%
IKSK.5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	19	19	100%
SK.30				



	Meningkatnya kualitas penanganan ATS			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	54	54	100%
IKSK.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	30	30	100%
SK.31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah			
IKSK. 1	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkanmutunya melalui BOP	11.250	10.136	90.1%
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			
IKSK. 1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaanyang lulus sertifikasi	51	35.89	70%
IKSK.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikandiniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75	75	100%



IKSK.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	75	75	100%
IKSK.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatanKKG/MGMP dan AKG	62	62	100%
SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal			
IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90	90	100%
IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90	90	100%
IKSK.4	Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90	90	100%
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatankualifikasi pendidik			
IKSK.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	51	41	70%



IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	58	58	100%
IKSK.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	95	95	100%
IKSK.4	Persentase Calon Pengawas yang menerima beasiswa S2	100	100	100%
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi			
IKSK.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	43	155	120%
IKSK.2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan statusakreditasi.	50	50	100%
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	77	77	100%
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	57	57	100%
IKSK.3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi	5	5	100%



	nasional maupun internasional			
IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	9	9	100%
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan			
IKSK.1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	100	100%
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	100	100%
IKSK.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	14	14	100%
IKSK.4	Persentase madrasah yang ramah anak	34	34	100%
SK.38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan			



IKSK.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporandan kesukarelawanan	15	15	100%
IKSK.3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	32	32	100%
IKSK.4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	3	3	100%
SK.39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum			
IKSK.1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	95	110	115.7%
IKSK.2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	96	96	100%
IKSK.3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2	2	100%
SK.40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri			
IKSK.1	Persentase rekomendasi izin orang asing	86	120	120%
SK.41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)			



IKSK.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	88	85	97%
IKSK.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	83	83	100%
IKSK.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	65	75	115.38%
IKSK.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang(minimum 71)	55	66	120%
IKSK.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	66	66	100%
IKSK.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	81	81	100%
IKSK.7	Persentase data ASN yang diupdate	92	92	100%
IKSK.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	77	77	100%



SK.42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai denganketentuan			
IKSK.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dante pat waktu	94	82	87.2%
IKSK.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	93	87	93.55%
IKSK.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	98	95	95.92%
IKSK.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	97	97	100%
SK.43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel			
IKSK.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	86	86	100%
IKSK.2	Persentase tanah yang bersertifikat	90	96	112%
IKSK.3	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	90	90	100%
SK.44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan			



	manajemen organisasi			
IKSK.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standaroperasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	72	72	100%
IKSK.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	79	79	100%
IKSK.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	76	76	100%
SK.45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi			
IKSK.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	88	88	100%
IKSK.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	32	32	100%
IKSK.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	31	31	100%



SK.46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran			
IKSK.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	92	92	100%
IKSK.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	76	76	100%
IKSK.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	73	73	100%
SK.47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran			
IKSK.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	88	88	100%
IKSK.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencanapembangunan nasional yang ditindaklanjuti	82	82	100%
SK.48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor			
IKSK.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	88	99	112.5%
SK.49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan,			



	arsip dan layanan pengadaan barang jasa			
IKSK.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	96	120	120%
IKSK.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	92	120	120%
IKSK.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	93	120	120%
IKSK.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	20	20	100%
SK.50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga			
IKSK.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	93	99.19	106.6%
SK.51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi			
IKSK.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	94	95	101%
IKSK.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	94	83	88.3%



SK.52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi			
IKSK.1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	91	91	100%
SK.53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan			
IKSK.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	4.307	4.048	94%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Agama DIY pada tahun 2022 adalah 100.37%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
	100.37%	100.4%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY mengalami kenaikan sebesar 0,03%.



C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antarpencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja pada Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta per Sasaran Strategis.

1. SK. 1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Penyuluh agama di setiap agama berperan untuk menyampaikan dakwah yang berisikan tentang merawat kerukunan antar agama, antar suku dalam perbedaan. Penyuluh agama di setiap agama memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat atau terhadap umat beragama. Untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, maka diperlukan peningkatan kompetensi penyuluh yang meliputi :

- a. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun, serta kemampuan dalam mengorganisir tugas, kemampuan melakukan pengkoordinasian dan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada, serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
- b. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja, kemampuan dalam memberikan bimbingan agama dan penyuluhan pembangunan, kemampuan melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok binaan, pembinaan kepada lembaga keagamaan.



- c. Kompetensi sosial kultural mengacu pada kamus kompetensi jabatan Kementerian Agama terdapat pada Kompetensi inti harmonisasi keberagaman, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan sehingga diharapkan mampu memberikan pencitraan yang baik dan positif pada penata layanan Penyuluh Agama.

2. **SK. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama maka Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melaksanakan kegiatan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Silaturahmi dengan tokoh agama/ketua lembaga agama

Agama merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, moderasi beragama diperlukan guna menjaga keharmonisan antara hak beragama dan kewajiban berbangsa dan bernegara, salah satunya di lingkungan instansi pemerintah. Untuk itu, pada tanggal 12 Januari 2023 Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan silaturahmi dengan tokoh agama hindu dan tanggal 13 Januari 2023 melaksanakan silaturahmi dengan tokoh agama Kristen.



SK 2a,b. Kakanwil Dr.Masmin Afif hadir Simakarma Bersama Tokoh Hindu di Gedung Santi Sasana Pura Jagatnatha



SK 2c. Kakanwil Kemenag DIY Dr. Masmin Afif, M.Ag didampingi Kankemenag Kota Yogyakarta H. Nadhif, S.Ag., M.Si dan Pembimas Kristen Kanwil Kemenag DIY Sri Gunarti Sabdaningrum melakukan Silaturahmi dengan Tokoh Agama Kristen di Gereja Gondokusuman Yogyakarta

b. Peningkatan Peran Pemuka Lintas Agama

Pada kegiatan ini dilaksanakan deklarasi pemuka lintas agama. Hal ini mengingatkan entitas keragaman Indonesia itu niscaya dan tidak mungkin ditolak. Menurut Menteri Agama pada kesempatan tersebut tidak ada Indonesia kalau tidak ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan agama atau kepercayaan lainnya. Indonesia berdiri karena keberagamannya. Pada kesempatan ini Menag juga menyampaikan, ikhtiar deklarasi ini semakin menancapkan pada diri pemuda akan kesadaran tentang keragaman Indonesia dan pentingnya kerukunan.



SK 2d,e. Kakanwil Dr. Masmin Afif bersama tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan menandatangani Deklarasi Damai Umat Beragama saat Jalan Sehat Kerukunan

c. Knowledge Sharing Moderasi Beragama

Kementerian Agama telah mendorong penguatan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama disini dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi ditengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama



adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Ada 4 indikator moderasi beragama yaitu:

- 1) Cinta Tanah air
- 2) Toleransi yang tinggi
- 3) Anti kekerasan
- 4) Mengakomodasi Budaya Lokal



SK 2e,f Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta menyelenggarakan Knowledge Sharing Moderasi Beragama, Bersama Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati didampingi moderator Subkhi Ridho dan pendamping



tenaga Ahli Wisnu Krisno Aji

d. Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama



SK 2g. Kabag TU Muntolib membuka Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama di Hotel Swissbelbotique, diikuti utusan FKUB DIY, Tokoh Agama, Pemuda Lintas Agama, Kemenag Bantul, Kulonprogo, penyuluh agama Konghucu, dan Kanwil Kemenag DIY

3. **SK. 3. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.**

Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang-orang



yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antarsatu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian. Kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup, tetapi juga menjadisuatu pandangan hidup. Orientasi dialog bukan untuk saling mengalahkan tetapi untuk memahami antara satu pihak dengan lain dengan baik, mencapai kesepakatan penuh secara universal. Dialog juga berorientasi sebagai sarana komunikasi untuk menjembatani jurangketidaktahuan dan kesalahpahaman dalam budaya yang berbeda, mengungkapkan pandangan dalam bahasa masing-masing. Dialog bukan hanya berorientasi untuk hidup bersama secara damai dengan cara toleransi dengan pemeluk agama lain, melainkan juga berpartisipasi secara aktif terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Lebih penting lagi orientasi dialog adalah koeksistensi ke pro-eksistensi. Koeksistensi mengutamakan terciptanya toleransi. Pro-eksistensi mencari persamaan doktriner, tradisi, semangat dan sejarah, juga berupaya mencari unsur-unsur yang meliputi perbedaan dan hal-hal yang menyimpan konflik. Dialog sangat penting untuk mengurangi kesombongan, agresivitas, dan hal-hal negatif lain dalam cara-cara pemeluk agama melaksanakan tugas penyebaran agama masing-masing melalui misi dakwah. Negara Indonesia yang pluralitas agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama bisa berdampak sangat negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Dialog dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan fenomena tersebut, dan dialog bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peran tokoh agama DIY dalam dialog antar umat



beragama secara signifikan mendukung upaya terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kanwil Kemenag DIY dalam rangka mencapai tujuan menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa :

- a. Dialog dan Capacity Building Penguatan Moderasi Beragama DIY Tahun 2023



SK 3a Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta melalui Bimas Hindu mengadakan kegiatan Capacity Building Penguatan Moderasi Beragama

- b. Pemberdayaan penyuluh agama katolik dalam moderasi beragama untuk Indonesia hebat



SK 3b Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Bimas Katolik menyelenggarakan Pembinaan Penyuluh Agama Katolik di Asrama Haji Transit Yogyakarta

- c. Senam Kerukunan dan Lomba Tradisional bersama Tokoh dan Pemuda Lintas Agama



SK 3c. Kakanwil Dr. Masmin Afif didampingi tokoh lintas agama kibaskan bendera start melepas peserta Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai



4. **SK. 4 Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** Bantuan Operasional FKUB adalah dana APBN yang dituangkan dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY maupun DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang digunakan untuk operasional FKUB pada tahun anggaran 2023. Untuk FKUB Propinsi bantuan operasional senilai Rp 50.000.000. Semua bantuan operasional dapat tersalurkan sesuai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional FKUB.

5. **SK. 5 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama**

Kerukunan intra umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Untuk mewujudkan kerukunan intra umat beragama beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.
- b. Mengadakan forum-forum komunikasi.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara keagamaan.
- d. Pembinaan kerukunan intern dengan melibatkan tokoh serta organisasi keagamaan secara langsung. Seperti halnya Festival Literasi Keagamaan dan Seminar Nasional Manuskrip Keagamaan Nusantara pada tanggal 15 November 2023 di Lapangan Brahma Candi Prambanan.



SK 5a,b Kakanwil Masmin Afif hadir memimpin doa lintas agama untuk Palestina pada pembukaan Festival Literasi Keagamaan dan Seminar Nasional Manuskrip Keagamaan Nusantara



- e. Pengukuhan pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kanwil Kemenag DIY.



SK 5c Kakanwil Masmin Afif disaksikan Kabid Penais Zawa Nurhuda mengukuhkan Pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kanwil Kemenag DIY

- f. Orientasi Pengembangan Program Penyuluh Agama Hindu



SK 5d Kakanwil Dr. Masmin Afif membuka dan memberikan pengarahan Orientasi Pengembangan Program Penyuluh Agama Hindu

6. SK. 6 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama



Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Penyuluh agama di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 100% yang berwawasan moderat dan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :

- a. Keikutsertaan Penyuluh dalam Kegiatan Moderasi Beragama
- b. Penyampaian Konten Moderasi melalui Medsos
- c. Memiliki nilai kemanusiaan
- d. Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika
- e. Berjiwa NKRI
- f. Memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan

7. **SK. 7 Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.**

Rumah ibadah secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah. Akan tetapi rumah ibadah juga berfungsi juga sebagai sarana sosial– seperti pendidikan, kegiatan sosial lainnya dan juga berfungsi politis. Sehingga dalam perkembangannya rumah ibadah harus dibuat ramah dan setoleran mungkin. Rumah ibadah yang ramah dan toleran memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Rumah ibadah yang memiliki fasilitas bagi umat difabel
- b. Rumah ibadah tidak digunakan oleh kelompok intoleran
- c. Rumah Ibadah melakukan aksi sosial di lingkungannya
- d. Terbuka untuk berkolaborasi seni budaya antar umat beragama



8. **SK. 08 Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik**

Siaran keagamaan di ruang publik meliputi : siaran keagamaan melalui media TV dan media radio. Dalam mewujudkan sasaran kegiatan ini, maka Kanwil Kementerian Agama DIY melakukan langkah bekerja sama dengan RRI dan ADI TV dalam siaran keagamaan, Radio selain sebagai media penyiaran hiburan dan berita tetapi juga dapat berfungsi sebagai media dakwah, ini merupakan media bagi penyuluh agama guna melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai khalifah dan profesionalis seorang penyuluh



SK 8a Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Yogyakarta Media Dakwah Melalui Radio

9. **SK. 09 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik**

Seluruh mata pelajaran telah bermuatan moderasi beragama. Di samping itu, guru telah mendapatkan pembinaan terkait moderasi beragama baik oleh kepala madrasah, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.



10. **SK 10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam**

Pendidikan Islam moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya yakni :

- a. Pendidikan damai, yang selalu menghormati hak asasi manusia dan persaudaran antar ras, bangsa dan kelompok agama.
- b. Pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan kemitraan.
- c. Pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam yaitu, humanisasi, liberasi untuk berubahan sosial.
- d. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama.
- e. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
- f. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual, wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan
- g. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
- h. Pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah pendidikan saat ini .
- i. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- j. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.



SK 10a Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Pakis) menggelar kegiatan Evaluasi Implementasi Moderasi Beragama pada pondok pesantren DIY

11. **SK. 11 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya**

Dialog lintas agama dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota. Hal ini karena dalam dialog antar agama, antar umat beragama dituntut untuk bisa saling memahami dan menghormati keyakinannya masing-masing sehingga dapat menjembatani perbedaan dan menghindari konflik.



SK 11a Kantor Wilayah Kementerian Agama D. I. Yogyakarta melalui FKUB menggelar kegiatan Dialog Lintas Tokoh Agama dan Lintas Lembaga Keagamaan

12. **SK.12 Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat**

Data jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) terbagi sebagai berikut :

- a. Event keagamaan yang melibatkan umat agama lain telah terselenggara sesuai dengan target yaitu Panitia pelaksanaan kegiatan upacara piodalan mengundang seluruh umat Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Lebih dari 600 umat Hindu yang ada di Gunungkidul ikut serta dalam upacara piodalan Pura Bhakti Widhi yang ke-21. Hadir dalam upacara tersebut, Bupati Gunungkidul Mayor (Purn.) H. Sunaryanta beserta jajarannya, ketua PHDI Kab. Gunungkidul, dan tokoh-tokoh umat Hindu yang hadir dalam kegiatan upacara piodalan



tersebut.



SK 12a Pembimas Hindu DIY Didik Widya Putra, SE, MM dan Bupati Gunungkidul Mayor (Purn.) H. Sunaryanta beserta jajaranya, ketua PHDI Kab. Gunungkidul, dan tokoh-tokoh umat Hindu yang hadir menghadiri upacara piodalan di Pura Bhakti Widhi, Bendo, Beji, Ngawen, Gunungkidul

b. Pelatihan Pembuatan Film Pendek Islami



SK 12b Kantor Wilayah Kementerian Agama D. I. Yogyakarta melalui Bidang Penaizawa menggelar kegiatan Pelatihan Pembuatan Film Pendek



13. **SK 13. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama**

Data Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll) adalah sebagai berikut :

- a. Pada ajang STQH Nasional, DIY akan mengirimkan 12 peserta dari 6 cabang, Adapun 12 cabang lomba STQH Nasional 2023 adalah Tilawah dewasa putra, Tilawah dewasa putri, Tahfidz 5 juz dan tilawah putra, Tahfidz 5 juz dan tilawah putri, Tahfid 10 juz putra, Tahfidz 10 juz putri, Tahfidz 20 juz putra, Tahfidz 20 juz putri, Tahfidz 30 juz putra, Tahfidz 30 juz putri, Hadits 100 dengan sanad putra, dan Hadits 100 dengan sanad putri.



SK 13a Khafilah dari perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta STQH Nasional XXVII Jambi

- b. Pada Ajang Pesparawi Ada 5 cabang lomba yang di laksanakan diantaranya Nyanyi tunggal anak SD, Nyanyi tunggal anak SMP, lomba Cerdas Tangkas Alkitab SMP, Cerdas Tangkas Alkitab SD, Paduan Suara Dewasa, dengan jumlah peserta 300.



SK 13b. Kepala Kemenag dan Pj. Wali Kota Yogyakarta Hadiri Pembukaan PESPARAWI 2023

14. **SK.14 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan**

Salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung keagamaan adalah dengan menginventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi direktori pustaka agama yang dilakukan per lokus serta melaksanakan pembinaan manajemen perpustakaan rumah ibadah

15. **SK.15 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan**

Pemerintah melalui Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan bidang agama hadir untuk masyarakat. Layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama menjadi penting, mengingat sensitifitas isu dalam bidang agama seperti dua mata pisau yang dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :



- a. Penyediaan sarana prasarana ibadah (mukena/sajadah/karpet/tikar/sound/mimbar) pada masjid/musholla.
- b. Bantuan sarpras ibadah (mukena/sajadah/karpet/tikar) masjid mushalla.
- a. pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah sehat.
- b. pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah.
- c. Pemenuhan Sarana dan prasarana layanan peribadatan.

16. **K.16 Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk**

Terdapat beberapa hal yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2023, terdapat 13 KUA yang direvitalisasi yaitu : 1. KUA Wirobrajan, 2. KUA Tegalrejo, 3. KUA Gondomanan, 4. KUA Dlingo, 5. KUA Pandak, 6. KUA Sedayu, 7. KUA Pakem, 8. KUA Turi, 9. KUA Mlati, 10. KUA Galur, 11. KUA Ponjong, 12. KUA Paliyan, 13. KUA Nglipar;



SK 16a Kabid Urusan Agama Islam Jauhar Mustofa, MSI menerima kunjungan Bidang Urais Kanwil Kemenag Kalbar yang dipimpin Kabid Ekshan, untuk studi tiru KUA Revitalisasi dan kesuksesan Pembangunan POB Syekh Bela Belu

- b. Pada Tahun 2023, KUA yang ditingkatkan sarana dan prasaranya adalah : distribusi bendera merah putih, bendera Kemenag dan stempel;
- c. Penghulu yang kompeten dengan kompetensi sebagai berikut :
 - 1) Kompetensi manajerial, hal ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Hal ini berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun. Selain itu memiliki kemampuan dalam mengorganisir tugas, melakukan pengkoordinasian dan mampu menggerakkan semua potensi yang ada serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
 - 2) Kompetensi Teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi



pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis kemampuan dalam membaca Al-Qur'an dan maknanya, termasuk kemampuan membaca kitab kuning khususnya yang berkaitan dengan fiqh munakahat dan permasalahan munakahat kontemporer, serta kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa arab dan bahasa Inggris.

- 3) Ketiga adalah Kompetensi Sosial Kultural, kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

17. **SK.17 Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga**

Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya adalah keluarga dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Islam
 - 1) Piloting program pusaka sakinah
 - 2) Keluarga peserta aktif/akseptor Pusaka Sakinah
- b. Kristen
 - 1) Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani
 - 2) Keluarga Kristen Suami Istri (Kriteria ini timbul saat evaluasi efektifitas pelayanan bimbingan keluarga 2019 yg mengikuti hanya suami atau istri saja, padahal keluarga harusnya terkait kedua belah pihak)



c. Katolik

- 1) Keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia melalui penyuluh
- 2) Keluarga yang mendapatkan pembinaan keluarga bahagia

d. Hindu

- 1) Keluarga yang mendapatkan pembinaan keluarga sukinah
- 2) Semua anggota keluarga beragama Hindu
- 3) Kepala keluarga memiliki pekerjaan/ usaha yang menghasilkan artha dan mampu mensejahterakan keluarga
- 4) Usia perkawinan minimal 5 tahun

e. Budha

- 1) keluarga yang memperoleh bimbingan pembinaan pembentukan keluarga hitta sukhaya melalui anggaran DIPA
- 2) pembinaan keluarga hitta sukhaya melalui penyuluh dan penyiar agama

Data untuk jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya adalah sebagai berikut :

- a) Pembinaan Keluarga Sakinah sejumlah 1.812 keluarga yang dilaksanakan di Kab. Kota 584 orang, Bantul 292 orang , KP. 292 orang. GK. 352 orag. Sleman 292 Orang;
- b) Pembinaan Keluarga Sukinah sejumlah 24 keluarga;
- c) Pembinaan Hitta Sukkhaya sejumlah 26 keluarga.



18. **SK. 18 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus langkah-langkah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan baik dengan tatap muka atau online, atau melalui media sosial.
- b. Kanwil / Kemenag Kab/Kota melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan, baik ke kantor PPIU, di bandara keberangkatan, dan menu aplikasi Siskohat





SK 18a,b Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Aidi Johansyah didampingi jajaran JF Bidang PHU membuka Konsultasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M

19. **SK. 19 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**

Beberapa hal yang menjadi faktor meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji adalah Pusat Layanan Haji yang memenuhi standar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki SOP pelayanan
- b. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat
- c. Memiliki ruang penerimaan berkas haji
- d. Memiliki alat rekam biometric
- e. Memiliki ruang penyimpanan arsip

20. **SK. 20 Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji**

Salah satu hal yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan jamaah



haji adalah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dengan kriteria memiliki tempat layanan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari embarkasi (Kepdirjen PHU38/2017 tentang Juknis Pengelolaan Asrama Haji).

21. **SK 21. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji**

Calon jamaah haji yang mengikuti manasik haji dengan kriteria :

- a. Mengikuti manasik haji KUA dan Kab/Kota berbasis anggaran PAOH
- b. Mengikuti manasik di KBIHU
- c. Mengikuti Jum'at Manasik di KUA dalam program Jum'at manasik

22. **SK. 22 Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.**

Peningkatan pengelolaan data dan system informasi haji terpadu dapat ditingkatkan dengan :

- a. Layanan bisa diberikan setiap hari sepanjang tahun
- b. Memiliki fasilitas layanan PC, Bimoterik, dan jaringan yang memadai
- c. Memiliki SDM yang menangani siskohat

23. **SK 23. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat**

Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan danazakat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Amil Zakat yang mendapatkan materi standarisasi Zakat



- b. Lembaga Zakat merupakan lembaga yang sudah Terdaftar
- c. Bantuan Operasional BAZNAS Provinsi Data untuk amil zakat dan lembaga zakat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase amil yang dibina	%	111.52%
Jumlah yang dibina		765
	Kanwil	455
	Kota Yk	15
	Sleman	115
	Bantul	38
	Kulonprogo	100
	Gunungkidul	42
Jumlah Total amil zakat		686
	Kanwil	135
	Kota Yk	15
	Sleman	221
	Bantul	60
	Kulonprogo	195
	Gunungkidul	60
2. Persentase lembaga zakat yang dibina	%	68.33%
Jumlah yang dibina		302
	Kanwil	47
	Kota Yk	7
	Sleman	156
	Bantul	38
	Kulonprogo	12
	Gunungkidul	42
Jumlah Total Lembaga Zakat		442
	Kanwil	27
	Kota Yk	7
	Sleman	221
	Bantul	63
	Kulonprogo	24
	Gunungkidul	100



SK 23a Kakanwil Dr Masmin Afif hadir memberikan sambutan pada Evaluasi Bimtek dan Uji Kompetensi Amil dan Penyerahan Penghargaan Audit Syariah dan IZN Tahun 2022

24. **SK 24 Meningkatnya pengelolaan aset wakaf**

Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan kriteria sebagaiberikut :

- a. Nazhir yang mendapatkan materi standarisasi Zakat
- b. Bantuan Operasional BWI Provinsi
- c. Lembaga Wakaf yang terdata tanah wakafnya (Sensus)

Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	100%
Jumlah yang dibina		583
	Kanwil	80
	Kota Yk	9
	Sleman	156
	Bantul	176
	Kulonprogo	87
	Gunungkidul	75
Jumlah Total Lembaga Wakaf		583
	Kanwil	80
	Kota Yk	9
	Sleman	156
	Bantul	176



	Kulonprogo	87
	Gunungkidul	75
2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta	100%
Jumlah akta ikrar wakaf diterbitkan		503
	Kota Yk	9
	Sleman	156
	Bantul	176
	Kulonprogo	87
	Gunungkidul	75
Jumlah Total Permohonan Ikrar Wakaf		503
	Kota Yk	9
	Sleman	156
	Bantul	176
	Kulonprogo	87
	Gunungkidul	75
3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Akta	75%
Jumlah tanah wakaf yang sudah sertifikat		377
	Kota Yk	3
	Sleman	107
	Bantul	144
	Kulonprogo	87
	Gunungkidul	36
Jumlah Total tanah wakaf (Asumsi)		503
	Kota Yk	9
	Sleman	156
	Bantul	176
	Kulonprogo	87
	Gunungkidul	75



SK 23b,c Kakanwil Masmin Afif didampingi Kabid Penais Zawa Nurhuda membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW)

25. **SK 25. Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.**

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya (peer mediated instruction). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru.



Adapun ciri-ciri dari pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- b. Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus ialah perubahan perilaku positif siswa.
- c. Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif.
- d. Bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.
- e. Model pembelajaran harus mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belajar



SK 25a Anggota Komisi VIII MY Esti Wijayati bersama narsum Oki dari Balai Tekkomdik didampingi Kabid Penmad Abd Suud dan JFT PTP Anita Isdarmini berikan materi Ngopi

26. **SK 26. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan**

- a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dari 7.142 baru 1.223 yang telah memperoleh TPG di Tahun 2023 karena terkendala pada masih terbatasnya



program pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan mutu kompetensi dan sertifikasi guru madrasah;

- b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan SI PAKIS melaksanakan penyaluran insentif ustadz/ustadzah pada bulan Juni 2023 dengan total jumlah penerima 246 orang;

- c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Seksi PAI melakukan penilaian kinerja GPAI dan melakukan pembayaran TPG GPAI dari jumlah guru 3.331 yang sudah sertifikasi 1.638. Selain dari APBN, pembiayaan PPG GPAI bisa berasal dari APBD, pada Tahun 2023 Kanwil Kemenag DIY melalui bidang pakis telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Daerah Kab Kota terkait pembiayaan ini, pada tahun 2023 Dispora DIY 97 orang pemda gunung kidul 40 orang pemda kulonprogo 10 orang dan Pemkot Yogyakarta 6 orangikut berpartisipasi dalam pembiayaan PPG Guru PAI.
- d. Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati dan Wakil Kepala Dikpora DIY Suherman. Dibuka Kabid Penmad Kemenag DIY Abd. Suud dengan materi Membangun Melalui Peningkatan Kompetensi Guru, Selasa (20/6/2023) di New Saphir Hotel, Yogyakarta.



SK 26a Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta gelar kegiatan "Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI)" bersama Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati dan Wakil Kadis Dikpora DIY Suherman, M.Pd

- e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan Asesmen Kompetensi siswa yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV yaitu tingkat MA dan MTs dan MI;
- f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi asesment kompetensi siswa dilaksanakan secara sampling terhadap 369 siswa. Asesmen Kompetensi siswa semester II sudah terlaksana untuk semua jenjang;
- g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi asesmen Kompetensi siswa sudah dilaksanakan.

27. SK 27. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Tujuan akhir proses pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Inti dari



proses pendidikan secara formal adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan upaya strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari segi proses dan hasilnya. Banyak faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini banyak diaplikasikan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seluruh madrasah di lingkungan Kanwil Kementerian Agama DIY telah memanfaatkan TIK dalam proses pembelajarannya.

28. SK. 28 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan			
IKSK.1.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		
	RA DIY	Kanwil	107/248	5 %
		Kota	2/248	
		Sleman	27/248	
		Bantul	24/248	
		Kulon progo	16/248	
		Gunungkidul	38/248	
	Jumlah RA			
	Jumlah RA yg memenuhi SPM sarpras			
	Pratama Widya Pasraman	Kota		
		Gunungkidul	1	100%
	Jumlah Pratama Widya Pasraman			
	Jumlah Pratama Widya Pasraman yg memenuhi SPM Sarpras			
	Prosentase			



IKSK.1.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		
	MI DIY	Kanwil	153/183	3%
		Kota	2/183	
		Sleman	19/183	
		Bantul	26/183	
		Kulon progo	28/183	
		Gunungkidul	78/183	
	Jumlah MI	183		
	Jumlah MI yg memenuhiSPM sarpras	153		
	ULA	Kota		
		Sleman	1,00	0,00
		Bantul	2,00	100%
		Kulon progo		
		Gunungkidul	1,00	100%
	Jumlah PPS ULA	4		
	Jumlah PPS ULA yg memenuhi SPM Sarpras	2		
	Jumlah SDTK	1	1,00	1,00
	Jumlah Adhi Widya Pasraman yg memenuhi SPM sarpras	1		
IKSK.1.3	TOTAL SPM/TOTAL LEMBAGA Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	156/188 %		
	MTS DIY	Kanwil	92/111	5%
		Kota	7/111	
		Sleman	21/111	
		Bantul	21/111	
		Kulon progo	13/111	
		Gunungkidul	30/111	
	Jumlah MTS	111		
	Jumlah MTS yg memenuhiSPM sarpras	92		
	WUSTHA	Kota	1,00	1/1
		Sleman	4,00	1/4
		Bantul	4,00	4/4
		Kulon progo	1,00	1/1
		Gunungkidul		0/1
	Jumlah PPS Wustha	10		
	Jumlah PPS Wustha yg memenuhi SPM Sarpras	5		



	Jumlah SMPTK	1	1,00	1,00
	Jumlah SMPTK	1		
	TOTAL SPM/TOTAL LEMBAGA	98/122		
IKSK.1.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		
	MA DIY	Kanwil	39/58	3 %
		Kota	5/58	
		Sleman	13/58	
		Bantul	11/58	
		Kulon progo	4/58	
		Gunungkidul	6/58	
	Jumlah MA	58		
	Jumlah MA yg memenuhi SPM sarpras	39		
	PPS Ulya	Kota	1	0/1
		Sleman	3	1/3
		Bantul	3	1/3
		Kulon progo	0	0
		Gunungkidul	0	0
	Jumlah PPS Ulya	7		
	Jumlah PPS Ulya yg memenuhi SPM Sarpras	0		
	SMTK	Kota		
		Sleman	1	1
	Jumlah Utama Widya Pasraman	1		
	Jumlah Utama Widya Pasraman yg memenuhi SPM sarpras	1		
	TOTAL SPM/TOTAL LEMBAGA	40/66		
IKSK.1.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%		
	PDF/Pendidikan Muadalah	Kota		
		Sleman	0/1	0/1
IKSK.1.6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%		
IKSK.1.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		



29. **SK 29. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat**

- a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah Tahun 2023 terdapat 27.532 siswa madrasah negeri yang mendapat BOS, pada BOS Swasta langsung dana alokasi langsung dari Pusat. BOS sebagai tambahan dana operasional untuk dukungan pembelajaran dan operasional madrasah;
- b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah adalah sebanyak 1.973 siswa melalui Bidang Pakis melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesertaraan dan SI PAKIS melaksanakan pembinaan/pendampingan updating data santri di aplikasi EMIS, karena salah satu persyaratan mengajukan BOS adalah santri ybs sudah terdaftar di EMIS. Selain melakukan pembinaan terkait EMIS juga melakukan pemantauan terkait penyaluran Dana BOS. Pada triwulan I dan II telah dilakukan proses pendataan dan telah dilaksanakan pembinaan/pendampingan updating data santri di aplikasi EMIS. Pada triwulan III telah dilakukan monitoring terhadap penyaluran BOS
- c. Persentase siswa madrasah penerima PIP dari 96.000 siswa hanya 20.680 usulan siswa yang mendapatkan PIP karena masih terbatasnya dukungan dana dari Pusat terhadap program PIP.
- d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP dalam rangka mencapai SK 29 IKS 29.5 Bidang Pakis melalui Seksi Pondok Pesantren melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis BOP dan Pendampingan Pelaporan BOP. Pada Triwulan I dilakukan



pemberitahuan BOP ke lembaga, proses verifikasi dan validasi data calon penerima BOP, dan penyusunan SK penetapan penerima BOP dan sosialisasi Juknis kepada penerima BOP. Pada Triwulan II, BOP yang sudah didistribusikan adalah BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk 133 lembaga. Pada triwulan III didistribusikan BOP PESANTREN : 25 lembaga, LPQ(Lembaga Pendidikan Alqur'an) : 92 lembaga, MDT(Madrasah Diniyah Takmiliyah) : 17 lembaga, PKPPS(Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah) : 4 lembaga, PDF (Pendidikan Diniyah Formal) : 3 lembaga, SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) : 2 lembaga.

30. **SK. 30 Meningkatnya kualitas penanganan ATS**

- a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
Berdasarkan SK Kanwil No 65 A Tahun 2022, terdapat 27 madrasah inklusi;
- b. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren dalam rangka mencapai SK 30 IKSK 30.2 Bidang Pakis melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan SI PAKIS melaksanakan Kegiatan pemetaan Anak Tidak Sekolah yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren dan sosialisasi program pendidikan kesetaraan. pada Triwulan I telah dilaksanakan pemetaan terhadap ATS yaitu ada di 5 pondok pesantren di sleman sebanyak 100 santri dan pada triwulan II telah dilakukan pemetaan terhadap ATS di 1 pondok pesantren di kulonprogo sebanyak 105 santri . Selanjutnya pada Tw III sudah dilaksanakan sosialisasi program pendidikan kesetaraan



31. **SK 31. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah**

1. Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP Jumlah siswa RA tidak mencapai pagu awal penetapan BOP karena faktor Pandemi dan pembatasan belajar di sekolah membuat orangtua siswa tidak memasukkan anaknya ke RA sehingga siswa RA, menjadi turun jumlah siswa RA nya.

32. **SK 32. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi dari 7.142 jumlah total guru baru 1.223 guru yang telah memperoleh TPG dan persentase guru PAI dari jumlah guru 3.331 yang sudah sertifikasi 1.638 guru karena terkendala pada masih terbatasnya program pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan mutu kompetensi dan sertifikasi guru madrasah/PAI.
2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sebanyak 57 guru MTsN 1 Yogyakarta mengikuti diseminasi penyusunan soal Asesmen.



SK 32a Dalam rangka peningkatan kompetensi Guru sebanyak 57 guru MTsN 1 Yogyakarta mengikuti diseminasi penyusunan soal Asesmen

3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh Peningkatan Kompetensi Guru dan Kepala MI/MTs, penyampaian materi oleh dosen dari Institut PTIQ Jakarta, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kepala Subdirektorat Bina GTK MI dan MTs; dan best practice dari MTsN 3 Cianjur, MTsN 1 Kota Makassar, dan MTsN 1 Kota Malang.



SK 32b Kepala Madrasah se-Kanwil Kemenag DIY mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru



dan Kepala MI/MTs

4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dalam rangka mencapai SK 32 IKSK 32.4 Bidang Pakis melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan SI PAKIS melaksanakan pendataan ustadz/ustadzah dan melaksanakan Kegiatan Penguatan KKG/MGMP kepada ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan. Pada triwulan I dan II telah dilaksanakan pendataan ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan dan persiapan kegiatan Penguatan KKG/MGMP kepada ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan. Kegiatan Penguatan KKG/MGMP kepada ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan dilaksanakan pada triwulan III

33. **SK 33. Terpenuhi jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal.**

Kualifikasi dan kompetensi minimal guru harus memiliki ijazah D4 atau S1, dan mempunyai sertifikat pendidik.

34. **SK 34 Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.**

- a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
Dari 339 pendaftar PPG hanya 193 orang yang dipanggil untuk mengikuti PPG.



- b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
Waiting list tahun 2022 guru PAI yang telah lulus pre test PPG sejumlah 276, dari jumlah tersebut telah mengikuti PPG tahun 2022 yang mulai bulan maret sebanyak 256, 10 orang belum mengajukan verifikasi dan validasi sedangkan yang 10 orang tidak memenuhi kualifikasi dan mengundurkan diri.
- c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1
Kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidik. Guru sebagai pelaksana pendidikan pada jenjang dasar, menengah dan usia dini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar nasional pendidikan. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan terobosan untuk menyiapkan calon guru profesional yang telah tersertifikasi. Persyaratan kualifikasi akademik guru setidaknya S-1 dan harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan berakhirnya sertifikasi melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka seluruh proses sertifikasi ditempuh melalui Pendidikan Profesi Guru

35. **SK 35. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**

Fasilitasi dalam peningkatan status akreditasi dilakukan dengan pemberian bantuan stimulus untuk akreditasi, pelaksanaan workshop bagi madrasah yang akan mengajukan akreditasi, serta pendampingan pada madrasah yang akan diakreditasi/supervise.



36. **SK 36. Meningkatnya budaya mutu pendidikan**

Madrasah yang dianggap mempunyai budaya mutu adalah madrasah yang mempunyai kultur mutu baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan suasana pembelajaran serta kultur akademik. Cara pandang untuk selalu unggul, tata kelola madrasah yang dinamis, kurikulum pembelajaran yang kreatif dan inovatif, para guru yang mempunyai karakter dan kapasitas di atas rata-rata madrasah lain dan penciptaan lingkungan madrasah yang mendukung untuk *fastabiqul khairat*. Pemimpin Madrasah, guru dan karyawan sama-sama berkomitmen menciptakan budaya mutu untuk mendukung kemajuan madrasah untuk mengantarkan lembaganya meraih kesuksesan.

37. **SK 37. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.**

Lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dapat ditempuh dengan implementasi pendidikan karakter di madrasah/sekolah.

Secara umum fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik.



- b. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur.
- c. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional.

Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong

38. SK 38. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

Pendidikan Kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar Kepramukaan dan metode pendidikan Kepramukaan.

Sasaran akhir dari Pendidikan Kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup.

39. SK 39. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang agama, Kementerian Agama pasti terlibat dalam berbagai bentuk produk hukum yang dikeluarkan. Untuk level Kementerian Agama pusat produk hukum bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Adapun untuk level kantor wilayah provinsi produk hukum dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan kepala kantor dan surat-surat lainnya.



Dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum, terdapat empat indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

1. Persentase produk hukum yang diterbitkan.

Hingga Akhir 2023 telah menerbitkan 773 Produk hukum dengan rincian: 750 SK 7 MoU 16 PKS;

2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;

Pemberian Bantuan Pesparawi Kanwil kepada LPPD yang hingga laporan Pertanggungjawaban;

3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.

Telah terlaksana kegiatan 2 pembinaan hukum, yaitu kegiatan berdasarkan anggaran dan kegiatan hasil kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY.

40. **SK 40. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri**

Salah satu tugas Kementerian Agama yang terkait dengan hubungan luar negeri adalah terkait perizinan tinggal orang asing di Indonesia yang terkait dengan persoalan agama. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing Di Bidang Agama. PMA 3/2023 ini merupakan regulasi baru yang memperbarui peraturan yang lama yakni Peraturan Menteri Agama nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama.

Orang asing dalam bidang agama sebagaimana dijelaskan oleh PMA 3/2023 terdiri dari beberapa kategori antara lain a) Tenaga Kerja Asing yang meliputi; rohaniwan, pengajar, dan tenaga ahli; b) mahasiswa/mahasantri; dan c) pelajar/santri.



Tugas pemberian rekomendasi izin orang asing tersebut juga menjadi tugas yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri nilai indikator kinerjanya adalah Total ada 86 dokumen rekomendasi yang sudah diterbitkan untuk 68 orang asing dengan rincian: ITAS : 34 RPTKA : 16 DKP : 19 IMTA : 12 ITAP : 5.

41. SK 41. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Apatur sipil negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu unsur ASN, pegawai negeri sipil (PNS) bertugas melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kualitas PNS itu sendiri.

Maka dari itu, manajemen PNS perlu diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas dapat berdaya guna, dan hasil guna. Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS.

Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, profesional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan untuk



kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ASN dengan menerapkan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, professional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



SK 41a. Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta menggelar sosialisasi SKB Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN



42. **SK 42. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan**

Manajemen Keuangan Pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pada dasarnya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan keuangan negara. Dalam hal ini keuangan yang dikelola oleh pemerintah adalah keuangan yang bersumber dari APBN. Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Adapun tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
- b. Menjaga stabilitas ekonomi
- c. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
- d. Mendorong Re-distribusi Pendapatan

Dalam mendukung sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, Kanwil Kementerian Agama DIY selalu memantau pelaporan keuangan pada semua satker di bawah Kanwil Kementerian Agama DIY sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu.



43. **SK. 43 Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel**

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran:

- a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
- b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai
- c. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar

44. **SK. 44 Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi**

- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
Kanwil Kementerian Agama sudah melaksanakan penetapan dan evaluasi



untuk 1 kanwil kemenag DIY, 5 kankemenag Kab/kota, dan 15 madrasah.

- b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
Kanwil Kementerian Agama DIY sudah melakukan evaluasi atas laporan kinerja yang disusun satuan kerja sejumlah 56 satker, antara lain : Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota dan madrasah negeri
- c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian TLHP sudah ditindaklanjuti

45. **SK 45. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Reformasi**

Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang dengan profesional karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran **Grand**



design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :

- a. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset*, dan *cultural set*.
- c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
- d. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

46. **SK 46. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**

- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
Sesuai dengan peraturan dirjen perbendaharaan nomor 4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja anggaran sesuai dengan pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa indikator kinerja pada pengukuran aspek kesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari revisi DIPA, defisiensi halaman 3 DIPA dan pagu minus
- b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang



tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bahwa Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sedang Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang baik output, outcome, impact untuk triwulan IV kanwil kemenag menetapkan 19%

47. SK 47. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama DIY berpedoman pada KMA no 94 tahun 2021.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi : (i) indikator masukan, (ii)



indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

48. **SK 48. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor**

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Pemeliharaan gedung Kantor, sisa Pagu untuk kebutuhan pembayaran Cleaning Service dan Membayar Pengharum ruangan s.d Desember 2023



- b. Pemeliharaan Peralatan Kantor
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - d. Rehab gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I Yogyakarta.
- sisa pagu anggaran akan dipergunakan untuk pembayaran Termin III (Oktober), dan Retensi (5%) untuk jaminan pemeliharaan, dan Konsultasi pengawasan (100%), anggaran administrasi PEngelolaan dibayarkan setelah BAST (Oktober 2023).



SK 48a Kakanwil NTT mengaku tertarik untuk mempelajari keunggulan PTSP Kanwil Kemenag DIY yang akan diterapkan di sana

49. **SK. 49 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa.**

- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
Pemanfaatan media elektronik untuk penyampaian tindaklanjuti surat masuk (Aplikasi SANTRI) meningkatkan tindaklanjuti penyelesaian surat dengan tepat waktu sejumlah 6.046 surat
- b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
10.255 naskah dinas pada kanwil telah dibuat secara elektronik



menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan sebagian besar surat/dokumen Kanwil dikirim melalui media elektronik, termasuk hasil layanan yang bersifat online

c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen

Seluruh arsip surat masuk dan keluar dan produk hukum Kanwil (sejumlah 16.301 arsip) telah di simpan dalam bentuk softcopy (pdf) dalam aplikasi SANTRI dan telah dilaksanakan alih media bagi arsip-arsip yang diciptakan oleh unit kerja.

d. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding

Terdapat Terdapat Sanggah di KUA Semanu GK (1 penyanggah) dan KUA Danurejan (3 penyanggah), sudah dilakukan jawab sanggah oleh Pokja Pemilihan dan jika tidak ada yang mengajukan sanggah banding dilanjutkan dengan pembuktian lapangan oleh tim PPK

50. **SK 50 Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga**

Terdapat Sanggah di KUA Semanu GK (1 penyanggah) dan KUA Danurejan (3 penyanggah), sudah dilakukan jawab sanggah oleh Pokja Pemilihan dan jika tidak ada yang mengajukan sanggah banding dilanjutkan dengan pembuktian lapangan oleh tim PPK.

51. **SK 51. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi**

a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi

Jumlah pemberitaan Kanwil Kemenag DIY dan kiriman berita satker



sesuai dengan target

- b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang *dicounter*

Selalu melakukan counter pemberitaan negatif

52. **SK 52 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**

Sesuai dengan KMA no 440 tahun 2018 tentang pengelolaan data dan informasi pada kementerian Agama maka kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta berusaha menampilkan data yang akurat, relevan, mudah diakses, tepat waktu, up to date. Syarat-syarat informasi yang baik antara lain, adalah :

- a. Ketersediaan availability. Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
- b. Mudah dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
- c. Relevan. Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.
- d. Bermanfaat. Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.
- e. Tepat waktu. Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
- f. Keandalan Reliability. Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.
- g. Akurat. Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara



tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya;

- h. Konsisten. Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

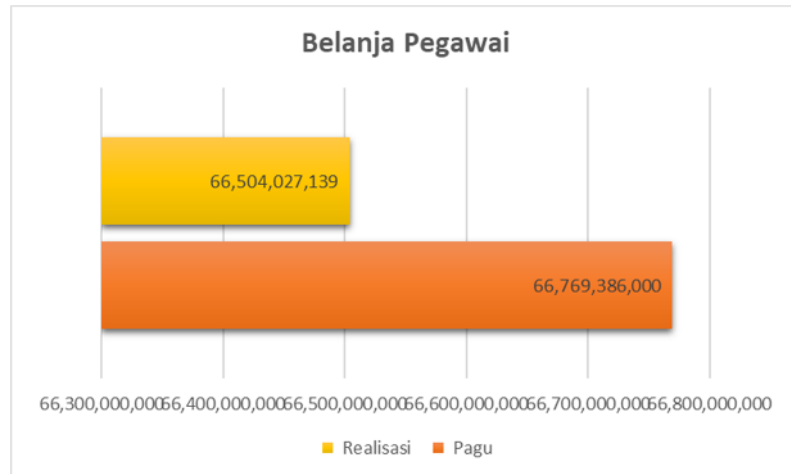
53. **SK 53 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan**

Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY adalah 4.371 pegawai

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Adalah Rp 130.845.979.000 dengan realisasi sebagai berikut :

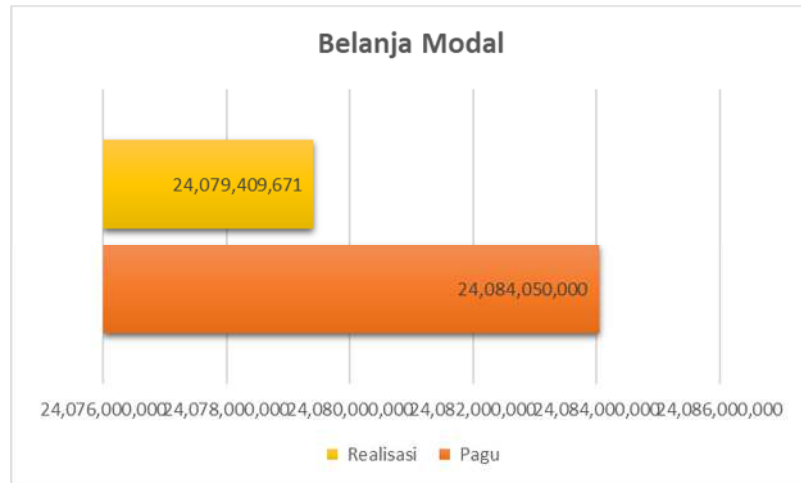
- 1. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai : Rp 66.504.027.139 (99,60%) dari total pagu Rp 66.769.386.000



- b. Belanja Barang : Rp 23.802.397.525 (94,04%) dari total pagu Rp 25.311.520.000



- c. Belanja Modal : Rp 24.079.409.671 (99,98%) dari total pagu Rp 24.084.050.000



d. Belanja Bantuan Sosial : Rp 0 (0 %)



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta ini menggambarkan capaian kinerja selama Tahun 2023 dalam mendukung visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang. Demikian Laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.



Daftar Lampiran



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 182 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya penerapan asas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun laporan kinerja;
- b. bahwa untuk menyusun laporan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Tim Penyusun;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun LKJ adalah :
1. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja;



2. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Mengolah data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Mendokumentasikan data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Melaporkan hasil analisis akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 1 Maret 2023
KEPALAKANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MASMIN AFIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 182 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM

Penanggungjawab : Dr. H. Masmin Afif, S.Ag, M.A
Koordinator : H. Muntolib, S.Ag, M.S.I
Ketua : Dr. H. Nur Ahmad Ghojali, S.Ag, M.A
Sekretaris : Kurnia Wulandari, S.Si
Anggota :
1. Dini Meiyanti, SE.,M.Si
2. Raudhah Al Jannah, SE.
3. Ngaisah,SE.,MAB
4. Hj. Meiyana Eka Astuti Wardani,SE.,MPA
5. Fatakhul Huda, S.E
6. Anas Effendi, S.M
7. Merpati Giras Suherjanji, S.S.T.Ars
8. Venawatie Yenny Astutie, S.H
9. Bakhtiar Nugroho, S.H
10. H. Moh Ridwan Afandi, S.H.I
11. Yeni Retnowati, S.E
12. Rohmi Rozaefi, S.T
13. Maslakhah, S.Ag
14. Aziz Shahroni, S.Ag
15. Dwi Asti Suspanti, S.H
16. Christina Sarmini
17. Surahman, S.Ag
18. Purwanto, M.Pd.H
19. Noer Faidah Maharini, S.Ag, M.S.I
20. Maria Goreti Susilawati, S.Kom
21. Tyas Wening Damayanti, S.E
22. Meitty Widarta, S.E
23. Muzayin Helmy, S.H

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MASMIN AFIF





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 588 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya penerapan asas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun laporan kinerja;
- b. bahwa untuk menyusun laporan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Tim Penyusun;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun LKJ adalah :
1. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 2. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja



Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Mengolah data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Mendokumentasikan data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Melaporkan hasil analisis akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 182 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 3 Oktober 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MASMIN AFIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 588 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM

Penanggungjawab : Dr. H. Masmin Afif, S.Ag, M.A
Koordinator : H. Muntolib, S.Ag, M.S.I
Ketua : Anas Effendi, S.M
Sekretaris : Eko Putro Doreri, S.Kom
Anggota :
1. Dini Meiyanti, SE.,M.Si
2. Ngaisah,SE.,MAB
3. Yunny Astuti, SE
4. Yuwanita Wahyudi, SH
5. Fatakhul Huda, S.E
6. Findita Dewi Setiasari, S.Psi, M.A
7. Merpati Giras Suherjanji, S.S.T.Ars
8. Venawatie Yenny Astutie, S.H
9. Kurnia Wulandari, S.Si
10. Brama Aji Putra, S.Kom.I
11. Raudhah Al Janah, SE
12. H. Moh Ridwan Afandi, S.H.I
13. Yeni Retnowati, S.E
14. Rohmi Rozaefi, S.T
15. Maslakhah, S.Ag
16. Aziz Shahroni, S.Ag
17. Dwi Asti Suspanti, S.H
18. Christina Sarmini
19. Surahman, S.Ag
20. Purwanto, M.Pd.H
21. Noer Faidah Maharini, S.Ag, M.S.I
22. Maria Goreti Susilawati, S.Kom
23. Tyas Wening Damayanti, S.E
24. Meitty Widarta, S.E
25. Muzayin Helmy, S.H

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MASMIN AFIF





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Sukonandi No.8 Telp. (0274) 513492, Fax. (0274) 516030
Yogyakarta 55166**

<http://yogyakarta.kemenag.go.id>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masmin Afif
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nizar
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke-7 (tujuh) dengan target senilai 70% (persen).

Bali, 13 Desember 2022

Pihak Pertama,



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	85	Nilai
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	100	%
		3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	468	Orang
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1.850	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	95	%
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	290	Orang
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	4	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6.800	Lembaga/ Orang
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	46	Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang	65	%

		dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	62	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	65 70 485 6	% % Orang Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	152	Konten/ Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100 100 100 100	% % % %

		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	12	Kegiatan
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	95	%
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	5	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	12	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian	Jumlah produk budaya berbasis	61	Lokasi

	dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	11	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	5	KUA
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	18	Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	50	Paket
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	480	Buah
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	60	%
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	58	Layanan
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	200	Lokasi
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20	Orang
		7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1	Lokasi
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	3	KUA
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	5	KUA

		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	9.350	Orang
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	3.860	Anak
		5. Jumlah penghulu yang dibina	47	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hittasukhaya	555	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	100 0,06	% %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	95,10	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	87,62 74,04	% %
24	Meningkatnya pengelolaan	1. Persentase lembaga wakaf	100	%

	aset wakaf	yang dibina		
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	94,09	%
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	91,33	%
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	83	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	100	%
		3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	2	Madrasah
		4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	16	Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	48	%
		2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	10	%
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	58	%
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	17	Penghargaan
		5. Jumlah penyelenggaraan	369	Kegiatan

		asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan		
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	55	%
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	87	%
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya	88	%

		Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana 7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	66 100 100	% % %
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagianak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah 3. Persentase siswa madrasah penerima PIP 4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP 5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	27.150 2.800 19 40 19	Siswa Siswa % % %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	54 30	% %

31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	11.250	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi 2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	51 75 75 62	% % % %
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan	89 90 90 88	% % % %

		agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; 3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	51 58 95 1	% % % Orang
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. 2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	43 50	Madrasah Sekolah
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	77 57 5 9	% % % %
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%

	menyenangkan dan bebas dari kekerasan	2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; 4. Persentase madrasah yang ramah anak.	100 14 34	% % %
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina 4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	15 1 32 3	Madrasah Sekolah Gugus Gugus
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	95 96 2	% % Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	86	%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan,	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan	88	%

	pembinaan dan pengembangan pegawai)	kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 7. Persentase data ASN yang diupdate 8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	83 65 55 66 81 92 77	% % % % % % %
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian	94 93 98 97	Laporan % % %

		Kerugian Negara pada Kementerian Agama		
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat 3. Persentase nilai <i>Opname Physis</i> (OP) BMN	86 90 90	% % %
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	72 79 76	% % %
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	88 32 31	% Satker Orang
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	92	%

		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	76	%
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	73	%
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	88	%
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	82	%
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	88	%
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	96	%
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	92	%
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	93	%
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	93	%
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	94	Konten
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	94	%

52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	91	%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	4.307	Orang

Nilai Kinerja Anggaran : 95

Kode	Nama Program / Kegiatan	Anggaran
DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	12.866.806.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	4.282.530.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1.110.000.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.486.105.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1.028.000.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	93.112.000
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	34.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	858.000.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.210.700.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.186.460.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	557.000.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	268.000.000
2148	Pembinaan Haji	210.539.000
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	-
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	542.360.000
DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	24.005.299.000
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	1.465.000.000
2129	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	21.914.799.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	33.500.000
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	-
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	480.000.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	112.000.000
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	43.938.014.000
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	9.442.500.000
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	31.540.694.000
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	534.620.000
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	724.500.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	721.000.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	350.700.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	411.000.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	213.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	35.507.484.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	40.000.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	434.516.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	15.771.017.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	150.000.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	250.000.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	3.837.951.000

2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	70.000.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	8.796.664.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	980.695.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	2.363.631.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	114.000.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	187.569.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	269.400.000
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	85.000.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.549.932.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	195.000.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	146.109.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	66.000.000
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	200.000.000
TOTAL		116.317.603.000



Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI

Mizar



Bali, 13 Desember 2022

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama D.I. Yogyakarta

Masmin Afif